

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

Balai KIPM LAMPUNG
2025



PRAKATA

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Lampung Triwulan III Tahun 2025 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja pada periode Triwulan III TA 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Lampung . Secara umum seluruh indikator kinerja Balai KIPM Lampung yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025 ada yang telah mencapai bahkan melebihi target Triwulan III Tahun 2025. Capaian kinerja positif IKU Balai KIPM Lampung Pada Triwulan III Tahun 2025 antara lain adalah Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai KIPM Lampung atas tersusunnya.

Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2025
Balai KIPM Lampung

Ashari Syarief, S.Pi, M.P

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (Balai KIPM Lampung), Badan Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) rencana kinerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada tahun 2025 Balai KIPM Lampung menetapkan 3 Sasaran Strategis (SS) dengan 16 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran Strategis tersebut adalah 1) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Kelautan Perikanan 2). Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, dan 3). Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan baik. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Balai KIPM Lampung melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).

Jumlah Sasaran Stategis yang dapat diukur sebanyak 3 buah yang merupakan indikator pada SS-1 sampai dengan SS-3. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Skor Kinerja IKU Triwulan III Tahun 2025 adalah **113,12** atau masuk dalam kriteria Istimewa (Biru). Secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur dan dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW III	REALIASI TW III	
				2025	2025	%
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Percentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70	100	120
		2	Percentase hasil Kelautan dan Perikanan sector Produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung(%)	70	100	120
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	0	0	0
		4	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	0	0	0
		5	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	99	100	101
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	0	0	0
		7	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	0	0	0
SK 3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	85	98,76	116
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	0	0	0
		10	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	0	0	0
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)	75	84,88	113

12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	0	0	0
13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	0	0	0
14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	76	100	120
15	Persentase pemenuhan 76 dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	0	0	0
16	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	88	89,86	102

Adapun dari anggaran, Triwulan III pada Tahun 2025 Balai KIPM Lampung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.410.927.080,- atau 60.49% dari PAGU yang dikelola sebesar Rp.6.959.853.000-. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 BKIPM Lampung secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

 EXCEL  PDF  FILTERCARI DI HALAMAN... 

FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. SEPTEMBER

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	649615 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	PAGU	4,887,585,000	2,404,614,000	0	0	0	0	0	0	0	7,292,199,000
		REALISASI	3,469,679,176	941,247,904	0	0	0	0	0	0	0	4,410,927,080
		(70.99%)	(39.14%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(60.49%)
		SISA	1,417,905,824	1,463,366,096	0	0	0	0	0	0	0	2,881,271,920
GRAND TOTAL			PAGU	4,887,585,000	2,404,614,000	0	0	0	0	0	0	7,292,199,000
			REALISASI	3,469,679,176	941,247,904	0	0	0	0	0	0	4,410,927,080
			(70.99%)	(39.14%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(60.49%)
			SISA	1,417,905,824	1,463,366,096	0	0	0	0	0	0	2,881,271,920

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIPRAKATA	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG	6
E. DASAR PENGUKURAN KINERJA	7
F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA	7
G. RUANG LINGKUP	7
H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA	7
I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	8
J. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB 2	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2025 - 2029	9
1. Visi KKP dan Badan KIPM KKP	9
2. Misi Balai KIPM Lampung	10
3. Tujuan Balai KIPM Lampung	10
4. Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	12
D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM Lampung	15
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/ IK	17
BAB 3	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM Lampung	18
B. CAPAIAN KINERJA	18
3.1. Realisasi Anggaran	63

3.2. Efisiensi Anggaran	64
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TW III TA 2025 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	66
D. ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TW III TAHUN 2025	68
BAB 4 PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. PERMASALAHAN	69
C. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung TW III Tahun 2025	v
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Tahun 2025-2029.....	11
Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2025	14
Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja.....	21
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung TW III Tahun 2025.....	22
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IK1 TW III Tahun 2025.....	27
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi IK2 TW III Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi IK3 TW III Tahun 2025.....	30
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi IK4 TW III Tahun 2025.....	32
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IK 5 TW III Tahun 2025.....	34
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi IK 6 TW III Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 7 TW III Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 8 TW III Tahun 2025.....	38
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi IK 9 TW III Tahun 2025.....	39
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi IK 10 TW III Tahun 2025.....	42
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 11 TW III Tahun 2025.....	43
Tabel 3. 14 Target dan Realisasi IK 12 TW III Tahun 2025.....	44
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 13 TW III Tahun 2025.....	45
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 14 TW III Tahun 2025.....	46
Tabel 3. 17 Target dan Realisasi IK 15 TW III Tahun 2025.....	46
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 16 TW III Tahun 2025.....	46
Tabel 3. 21 Data Anggaran	65
Tabel 3. 22 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode Triwulan III Tahun 2025	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung	4
Gambar 3. 1 Dashboard Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung TW III Tahun 2025	19
Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TW III Tahun 2025 Balai KIPM Lampung.....	40

BAB 1 PENDAHULUAN

• LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mendukung Visi nasional kita " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" melalui Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia yang diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan yang baik salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Selaras dengan fungsinya BPPMHKP menyelenggarakan fungsi pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai aparat ASN seluruh pegawai BPPMHKP dituntut untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2025-2029, yaitu, Swasembada pangan, energi, air ekonomi Syariah,digital,hijau dan biru. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

- **DASAR HUKUM**

Balai KIPM Lampung melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Lampung memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai KIPM Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

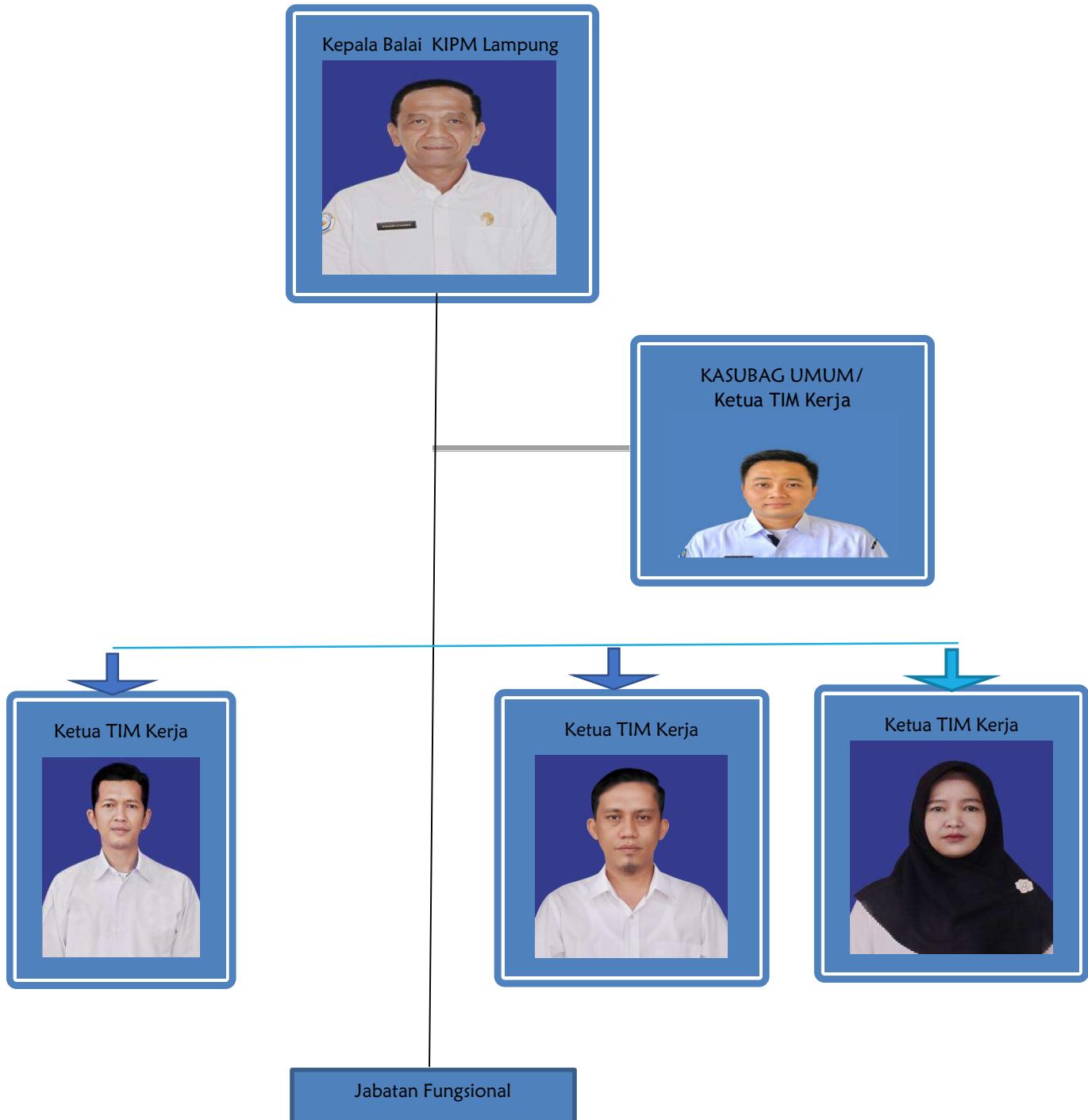
- Menyusun kebijakan teknis, rencana, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan administrasi badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan pengujian terhadap mutu hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- Menyusun pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- Menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil perikanan.
- Mengumpulkan, pengolahan data dan informasi, pengendalian mutu, hayati ikan; dan
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung

- **AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG**

Salah satu agenda misi pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional yaitu dengan meningkatkan sistem Pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan, dengan meningkatnya peran serta Balai KIPM Lampung diharapkan mampu mencapai misi tersebut.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktik KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai KIPM Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam agenda pembangunan nasional berupa Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

- **DASAR PENGUKURAN KINERJA**

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 35 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai KIPM Lampung Nomor : SP DIPA- 032.13.0.649615/2025 tanggal 2 Desember 2024.

- **TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

- Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Balai KIPM Lampung sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
- Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing Balai KIPM Lampung.

- **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Balai KIPM Lampung dan Perjanjian Kinerja level 2 yang disepakati Kepala Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM.

- **WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Periode yang dinilai | : Juli s.d. September 2025 |
| 2. Waktu pelaksanaan penilaian | : Oktober 2025 |

- **METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

- Pengukuran atas Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan 30 September 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2025.
- Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 15 Oktober 2025.

- **SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan BPPMHKP, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU;
- 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Balai KIPM Lampung, Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2025 dan
- 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2025 - 2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2025-2029 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2025-2029 dan turunannya pada Balai KIPM Lampung sebagai bagian dari unit Eselon I di bawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan BPPMHKP KKP

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Balai KIPM Lampung merancang visinya sesuai misi BPPMHKP sebagai berikut :

“Hasil Perikanan yang sehat, bermutu aman dan terpercaya untuk terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.”

Visi tersebut *dilatarbelakangi* oleh adanya keinginan seluruh pegawai BPPMHKP KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP. Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. *Misi Balai KIPM Lampung*

Misi Balai KIPM Lampung dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Badan KIPM, yaitu:Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Balai

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan yangberkelanjutan
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas hama dan penyakit.

KIPM Lampung dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. *Tujuan Balai KIPM Lampung*

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Balai KIPM Lampung Adapun tujuan strategis Balai KIPM Lampung :

- :
- a. *Terwujudnya Kinerja Balai KIPM Lampung yang Efektif dan Efisien;*
 - b. *Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola Balai KIPM Lampung yang Baik;*
 - c. *Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan Balai KIPM Lampung*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan operasional Balai KIPM Lampung. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Balai KIPM Lampung yang disampaikan di atas tertuang dalam rancangan Renstra 2025-2029 yang telah ditetapkan BPPMHKP.

4. *Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung*

Secara keseluruhan, melaksanakan Sasaran Strategis menjadi 3 (Tiga) SS seperti disajikan pada tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.
3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup BPPMHKP, Balai KIPM Lampung harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Badan PPMHKP. Sasaran Strategis (SS) lingkup Balai KIPM Lampung merupakan mendukung capaian kinerja level Badan PPMHKP, (level 1). Selanjutnya, hal tersebut di-cascading ke level di bawahnya dan di-alignment antar staff ke seluruh pegawai Balai KIPM Lampung.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2025, Balai KIPM Lampung melaksanakan 3 (Tiga) kegiatan utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 6.959.853.000. Kedua kegiatan tersebut adalah :

1. Pengendalian mutu anggaran senilai Rp. 331.800.000
2. Manajemen Mutu Rp. 135.000.000
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai KIPM Lampung dengan alokasi anggaran senilai Rp 6.489.853.000

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025

Penetapan kinerja Balai KIPM Lampung TA 2025 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan PPMHKP tersaji dalam Lampiran 1.sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025				
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70

		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70
		3	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sector produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1
		4	Lokasi Pengawasan Mutu hasil perikanan sector produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1
		5	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	99
KINERJA				
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar	6	Nilai Kualitas penerapan system manajemen mutu Laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	75
		7	Nilai Kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	75
KINERJA				
SK.3	Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM Lampung	8	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai IPM Lampung	92
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung	71,5
		10	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	87
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	86
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Lampung	85
		14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang di umumkan pad SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Lampung	76
		15	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70
		16	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung (Indeks)	88

Tabel 2.2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2025

D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM LAMPUNG

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai UPT BPPMHKP lingkup KKP, Balai KIPM Lampung melaksanakan program dan kegiatan Pengendalian mutu, karantina ikan, Sistem dan Standar Kepatuhan, dan Dukungan Manajemen" dengan rincian kegiatan;

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
3. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
6. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/ IK

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Balai KIPM Lampung telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja. Yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis danwaktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Balai KIPM Lampung dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel di Lampiran 2.

RENCANA AKSI PELAKSANAAN IKU

DI BALAI KIPM LAMPUNG

TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN	KEGI ATAN PENDUKU NG	ANGGARAN	SATU OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET/ OUTP U KOMPONEN	TARGET OUT PUT BULANAN											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Pengembangan dan Pengawasan Mutu Hasil Kegiatan perikanan	Peningkatan kelausuran perikanan ekor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Lembaga kelausuran dan perikanan ekor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Penerapan Sertifikasi Produk Primer Yang di validasi	170.000.000	Persen	70												70
	Peningkatan kelausuran dan perikanan ekor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point	Impekasi dan verifikasi penerapan HACCP	20.000.000	Persen	70												70
Target Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor Perikanan Pesisir Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Monitoring Comisiun Pesisir	Monitoring Comisiun Pesisir	Monitoring	26.000.000	Lokasi	1												1
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor Perikanan Pesisir Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik	50.000.000	Lokasi	1												1
Rasio ekspor hasil dan hasil perikanan yang diterima oleh negara (lingkup UPT Balai KIPM Lampung)	UJI yang kompatibel menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	SURVEI UJI KE UJI DALAM RANGKA OFICIAL CONTROL	20.000.000	Persen	99													99
Terwujudnya Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang konsisten secara Statistik	Nilai kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Lampung	Penerapan Standar Metode Pengujian	Standarisasi sistem manajemen mutu	33.000.000	Nilai	75												75
	Nilai kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Lampung	Penerapan sistem manajemen mutu (ambilan inspeksi)	Unit pelaksana teknis BPPM-BPT yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium ISO 17025	24.000.000	Nilai	75												75
Tujuan Kelausuran yang efektif/efisien dan akurat dalam bidang pengawasan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan perikanan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	Layanan Umum	Layanan Umum	6.414.000	Nilai	97												97
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPKM Lingkup Balai KIPM Lampung	Program Nilai tambah dan daya sang iniatif	Layanan Manajemen Keuangan	4.629.428.000	Nilai	715												715
	Persentase Penyelesaian Tersentuh BPK Lingkup Balai KIPM Lampung				Persen	100												100
	Indeks Profesional ASN Lingkup Balai KIPM Lampung				Indeks	87												87
	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Satker Balai KIPM Lampung				Nilai	86												82
	Persentase Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup bala KIPM Lampung				Persen	85												80
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PTU yang diumumkan pada GIRIP Lingkup UPT Balai KIPM Lampung				Persen	76												80
	Persentase Penyelesaian Dokumen Pemberangkatan Zon Inisiatif Lingkup UPT Balai KIPM Lampung				Persen	70												
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Lampung				Nilai	88												80

Bandar lampung, 3 Februari 2025

Kepala Balai KIPM Lampung



Ditandatangani Secara Elektronik

Ashari Syarief,S.Pi.M.P

NIP.196905151995031002

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM LAMPUNG

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Balai KIPM Lampung membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing bagian di Balai KIPM Lampung untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap Tri wulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Kode Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	BAIK	Nilai 90 - < 110
3.	CUKUP	Nilai 70 - < 90
4.	Kurang	Nilai 50 - < 70
5.	Sangat Kurang	Belum Input Capaian
6.	Belum ada Penilaian	

Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung tahun 2025 terdiri dari 3 (Tiga) SS yang diukur keberhasilannya melalui capaian 16 IKU/IK dengan target yang ditentukan.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Balai KIPM Lampung dari bulan April sampai dengan Juni 2025. Capaian kinerja yang diukur per Triwulan III pada Tahun 2025 untuk Level 1 (Badan KIPM) terdiri dari capaian kinerja pada 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan dari 16 IKU/IK. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung yang diukur Pertriwulan III pada Tahun 2025 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya tahun 2025. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target TW III	Realisasi TW III	%
SASARAN STRATEGIS						
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Percentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	70	100	120
		2	Pertase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	70	100	120
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		4	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		5	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung	99	100	101

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		%
2	Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		7	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		%
3	Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		10	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Lampung.	0	0	0
		13	Presentasi Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		14	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai KIPM Lampung	76	100	120
		15	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	0	0	0
		16	Survey Kepuasaan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	88	90,63	103

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Triwulan II Balai KIPM Lampung Tahun 2025



Gambar 3. 2 Dashboard Capaian Kinerja Triwulan III Balai KIPM Lampung Tahun 2025

Pada gambar diatas, Nilai capaian kinerja IKU mencapai nilai 112,47. Sedangkan capaian kinerja IKU dan IK secara keseluruhan ditunjukan melalui skor kinerja sebesar 112,47 yang masuk dalam kriteria Istimewa (Biru).

Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/ IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 16 (Enam Belas) IKU yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja (IK) yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing SS dan IKU/IK dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

IK 1

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Lampung

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir dan sebagai Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/suplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai enam standar dan acuan layanan untuk sertifikasi produk perikanan Primer. terdiri sari

1. Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)
2. Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB)
3. Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal (CPIB kapal)
4. Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
5. Cara Pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB)
6. Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Melalui sertifikasi standar dan acuan layanan produk kelautan dan perikanan.

Diharapkan itu bisa meningkatkan komitmen untuk senantiasa menjaga mutu dan kualitas setiap produk kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia terkhusus untuk keperluan ekspor.

Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 dapat dinyatakan sebesar 120% dari target 70%. Terealisasi 3 unit yang dapat sertifikat CPIB Yaitu Tangi Maning (ID-CPIB-K-18-250276) Sri Rejeki (ID-CPIB-K-18-250278). dan Sri Bangun 02 (ID-CPIB-K-18-250277)

IK 2

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di Lingkup Balai KIPM Lampung

Persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini semakin ketat dalam rangka pemenuhan pasar nasional maupun Internasional. Balai KIPM Lampung telah melaksanakan kegiatan quality Assurance pada kegiatan penjaminan produk pasca panen diantaranya HACCP dan sertifikasi HC. Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup Balai KIPM Lampung merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat.

Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 dapat dinyatakan sebesar 100%.

IK 3

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Primer Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)

Pengawasan mutu hasil kelautan perikanan sector produksi dilakukan melalui monitoring sebuah proses untuk memerlukan terhadap cemaran marine biotoxin dan atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan perikanan. Lokasi wilayah perairan dan Pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku industry maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya. Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi.

IK 4**Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)**

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik dilakukan sebagai Implementasi dari terbitnya Inpres 01 tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat hidup sehat. Lokasi dan kegiatan ini adalah pasar modern,pasar tradisional,supplier,TPI/PPI yang ikannya dikonsumsi masyarakat.pengawasan dilakukan dengan menilai sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoletik,mikrobiologi,kimia dan bahan berbahaya(formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan. Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi.

IK 5**Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan merupakan perbandingan antar jumlah ikan dan hasil perikanan yang tersertifikasi dan volume yang diekspor ke pasar Internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor. Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 dapat dinyatakan sebesar 100%. Dengan tidak ada Penolakan Pengiriman Ikan dan Hasil Perikanan yang diekspor..

IK 6**Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu
Laboratorium Lingkup Balai KIPM Lampung**

Penerapan sistem jaminan mutu di laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk. Sistem jaminan mutu juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi lembaga. Salah satu standar yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium adalah ISO 17025. Penerapan ISO 17025 dapat memberikan banyak manfaat seiring untuk peningkatan keandalan hasil pengujian dan kalibrasi. Kualitas pengelolaan manajemen dan mengurangi risiko kesalahan dan pengulangan dalam proses pengujian. Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi.

IK 7**Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga
inspeksi Lingkup Balai KIPM Lampung**

Penerapan sistem jaminan mutu di laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk. Sistem jaminan mutu juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi lembaga. Salah satu standar yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium adalah ISO 17020. Penerapan ISO 17020 dapat memberikan banyak manfaat seiring untuk peningkatan keandalan hasil pengujian dan kalibrasi. Kualitas pengelolaan manajemen dan mengurangi risiko kesalahan dan pengulangan dalam proses pengujian. Pencapaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi.

IK8**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)**

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Return SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Lampung pada Triwulan III Tahun 2025 Belum ada realisasi.

IK 9**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terhadap layanan lingkup Balai KIPM Lampung**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindaklanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. NKA merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Nilai diperoleh berdasarkan data input dan output yang akan diukur pada Akhir Tahun 2025 dengan

target 71,5. Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu Kerja. IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki pada Triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi.

IK 10

Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelesaian nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah batas tertinggi Temuan Keuangan Hasil LHP BPK, yang dibuktikan dengan Berita Acara LHP Tim Pembahas/Penilai dari BPK. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Lampung adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LK Balai KIPM Lampung Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2025. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU/IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 belum ada realisasi

IK 11

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Lampung

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). target 87 pada tahun 2025.

Untuk Membangun pegawai bersih dan Profesional dengan menegakan integritas. Pada Tahun 2025 Balai KIPM Lampung mempunyai target 75 pada Triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi.

IK 12

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker Balai KIPM Lampung

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Lampung adalah kegiatan/proses mencocokan kesesuaian antara aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia. Guna terwujudnya IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Lampung, maka Tim Pembahas/Penilai dari Biro Perencanaan – KKP ditugaskan untuk melakukan kegiatan mencocokan kesesuaian antara aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia.

Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan. Penilaian Mandiri SAKIP Internal Lingkup BPPMHKP Tahun 2025 diselenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP. Penilaian rekonsiliasi kinerja mengacu pada Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Internal BPPMHKP dimana aspek penilaian meliputi 4 (empat) unsur/aspek,

antara lain :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Aspek Kepatuhan | 3. Aspek Ketercapaian |
| 2. Aspek Kesesuaian | 4. Aspek Ketepatan |

Triwulan III Tahun 2025 di IKU Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Lampung belum ada realisasinya.

IK 13

Presentasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Lampung yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 80% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2024. Target pengukuran IKU ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2024.

Hal tersebut menunjukan bahwa rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Lampung telah ditindaklanjuti sangat baik oleh

mitra eselon I. Keberhasilan Capaian Sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU rekomendasi hasil pengawasan yang di dan sudah manfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki angka target pada tahun 2025 adalah 85% dan pada triwulan III belum ada realisasi.

IK 14

Persentase rencana umum Pengadaan PBJ diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengadaan Barang dan jasa selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIRUP . Persentase tingkat kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah persentase kesesuaian pelaksanaan Pengadaan dengan aturan yang ditetapkan, pengukuran dengan target 76%.

IKU/IK ini diukur Triwulan II Tahun 2025. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan evaluasi. Keberhasilan capaian sasaran kegiatan IKU tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa memiliki angka target pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 76% dan dengan realisasi sebesar 100%.

IK 15

Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Pembangunan Zona Integritas merupakan budaya anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan dan akuntabel. seiring perpaduan nilai-nilai BerAKHLAK bagi seluruh pegawai Balai KIPM Lampung. Pembangunan Zona Integritas mempunyai dua Komponen Utama

1. Komponen Pengungkit terdiri

- Area Manajemen Perubahan
- Area Penataan Tatalaksana
- Area Manajemen SDM

- Area Akuntabilitas Kinerja
- Area Pengawasan
- Area Pelayanan Publik

2. Komponen Hasil

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan public yang prima.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas target pada Triwulan III Tahun 2025 belum ada realisasi.

IK 16 Nilai kepuasan masyarakat Terhadap layanan di UPT Balai KIPM Lampung

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (nilai) merupakan indikator utama Balai KIPM Lampung dalam mewujudkan pelayanan kepada mayarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Balai KIPM Lampung. Pencapaian indikator ini pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,63 persen dari 35 responden.

3.1. Realisasi Anggaran

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARA(Rp)
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
1.	Pengendalian Mutu	335.000.000
2.	7010 Manajemen Mutu	135.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.489.853.000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025		6.959.853.000

Tabel 3. 27 Data Anggaran

Alokasi anggaran BKIPM Lampung pada tahun anggaran (T.A) 2025 pada DIPA Awal sebesar Rp 6.959.853.000,- .dan Mengalami Revisi sampai 9 kali pada triwulan III Tahun 2025

Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 6.688.971..000,- dan PNBP sebesar Rp 270.882.000,- Pada DIPA Triwulan III Tahun 2025.

URAIAN	ANGGARAN / PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	750.000.000	104.815.000	13,98 %
JUMLAH PENDAPATAN	750.000.000	104.815.000	13.98%
BELANJA			
Belanja Pegawai	4.555.239.000	3.806.145.795	83.56%
Belanja Barang	2.404.614.000	1.013.535.035	42.15%
Belanja Modal	0	0	0%
Belanja Bansos	0	0	0%
JUMLAH BELANJA	6.959.853.000	4.819.680.830	70,26%

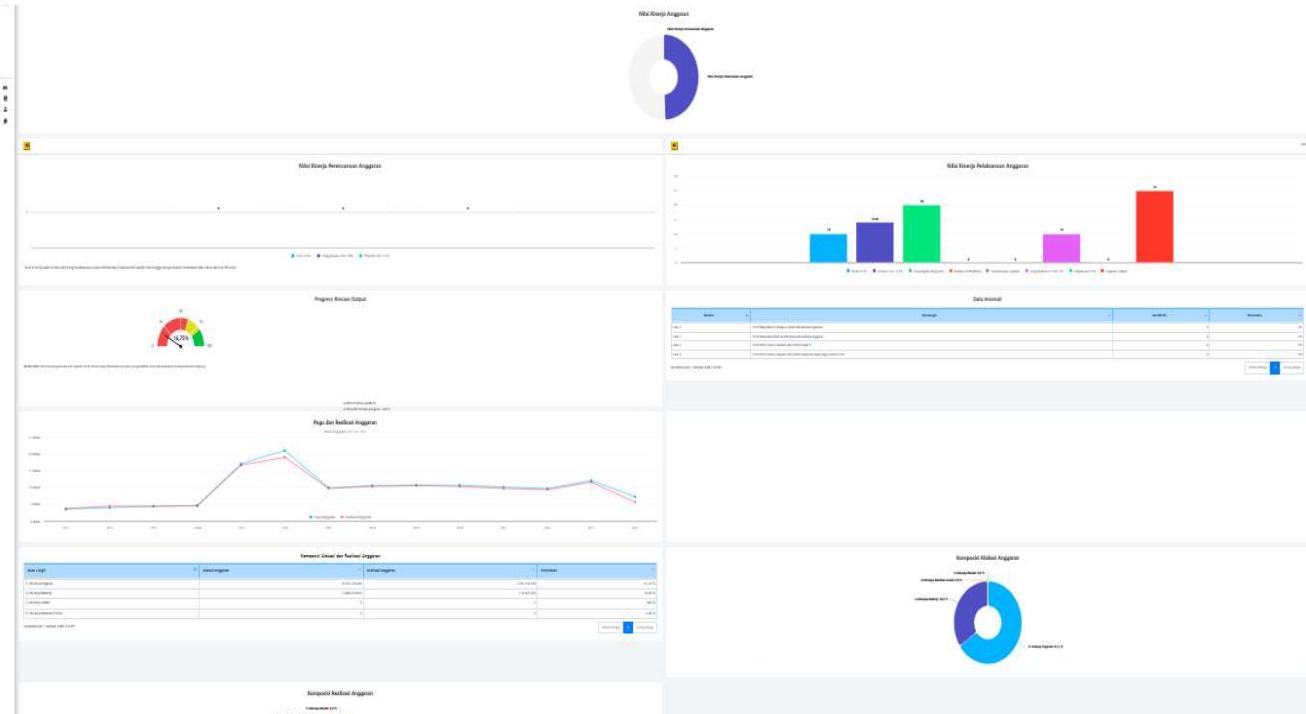
Tabel 3. 31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode Triwulan III TA 2025

3.2. Efisiensi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Efisiensi Belanja Bidang Kementerian / Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 seluruh lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran.

Hal ini dilakukan untuk peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan anggaran pembangunan. Untuk itu BKIPM Lampung juga melaksanakan instruksi tersebut dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin. Sumber penghematan bersumber dari penggunaan anggaran belanja non operasional,

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Disamping itu telah melakukan langkah-langkah streaming pertemuan, dengan melakukan video conference agar bisa melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas.





C. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

PAGU anggaran Balai KIPM Lampung TA 2025 sebesar 6.959.853.000 Capaian realisasi Triwulan III anggaran Balai KIPM Lampung TA 2025 cukup baik yaitu mencapai Rp.4.410.927.080,- atau 60,49% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.2.881.271.290 atau 39.51%. Secara lebih rinci, kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data OM SPAN disajikan pada Lampiran.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. SEPTEMBER CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	649615 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	PAGU	4,887,585,000	2,404,614,000	0	0	0	0	0	0	0	7,292,199,000
		REALISASI	3,469,679,176	941,247,904	0	0	0	0	0	0	0	4,410,927,080
			(70,99%)	(39,14%)	(0,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(60,49%)
		SISA	1,417,905,824	1,463,366,096	0	0	0	0	0	0	0	2,881,271,920
	GRAND TOTAL	PAGU	4,887,585,000	2,404,614,000	0	0	0	0	0	0	0	7,292,199,000
		REALISASI	3,469,679,176	941,247,904	0	0	0	0	0	0	0	4,410,927,080
			(70,99%)	(39,14%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(60,49%)
		SISA	1,417,905,824	1,463,366,096	0	0	0	0	0	0	0	2,881,271,920

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TA 2025 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Balai KIPM Lampung telah melakukan perbandingan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 terhadap target kinerja Triwulan III tahun 2025.

Berdasarkan data capaian kinerja dari 16 IKU/IKS yang ada, sebanyak 5 (Lima) IKU/IK telah dilakukan pengukurannya. Secara umum, dari 5 IKU yang dilakukan pengukuran telah mencapai target yang ditetapkan, hasil analisis terbatas terhadap IKU/IK yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2025 serta dibandingkan terhadap target pada Triwulan III TA 2025.

E. ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI		SIS A	
			REVISI	Rp	%Rp	%	
1	Dukungan Manajemen	6.489.853.000,-	6.489.853.000,-	4.803.842.830	74.02 %	1.686.010.170	25,98%
2	Pengendalian Mutu	335.000.000,-	335.000.000,-	3.200.000	0,96%	331.800.000	99,04%
3	7010	135.000.000,-	135.000.000	12.638.000	9,36%	132.000.000	90,64%
TOTAL		6.959.853.000	6.959.853.000	4.819.680.830	69.25%	2.149.810.170	30.75%

Tabel 3.33 Perkembangan Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per 30 September 2025

Balai KIPM Lampung TA 2025 melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu 1. (3987) Dukungan Manajemen Internal lingkup Badan Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.6.489.853.000,- 2.(3989) Pengendalian Mutu Rp. 335.000.000,- dan 3, (7010) Rp. 135.000.000,- Sebagian besar kegiatan operasional Balai KIPM Lampung ditampung dalam 3 kegiatan sedangkan untuk Gaji dan keperluan Kantor di Tampung dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup Balai KIPM Lampung Berikut ini disampaikan Data Perkembang Realisasi.

Data realisasi yang tertera di atas sebesar 4.819.680.830,- (Pagu) adalah data yang telah di SPJ-kan ke KPPN dan telah terbit SP2D, sehingga ada Sisa Rp. 2.149.810.170,-. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Balai KIPM Lampung telah mencapai 69,25%.. Hal ini menunjukan upaya pencapaian kinerja anggaran maupun kinerja organisasi yang telah ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Lampung melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Balai KIPM Lampung Triwulan III Tahun 2025 secara keseluruhan dinilai baik dengan skor kinerja sebesar 112,47
2. Sebanyak 16 (Enam Belas) IKU dan IK yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2025 ada yang telah mencapai target bahkan melebihi target dan tidak ada yang dibawah Target yang ditetapkan.
3. Capaian realisasi anggaran Balai KIPM Lampung TW III TA 2025 cukup baik yaitu mencapai Rp. 4.819.680.830,- atau 69,25% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.149.810.170,- atau 30.75%.

B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan atau kondisi yang belum sesuai harapan pada pencapaian kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai KIPM Lampung:

B. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Balai KIPM Lampung akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyesuaikan agenda untuk penyelesaian target Realisasi IKU yang Sudah tercapai, serta meningkatkan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan penanggungjawab kegiatan secara melekat

